

IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (SIPEKAT) di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Nurul Fahtika Sari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
nurulfahikasari@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan admknistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum
Universitas Negeri Surabaya
efanida@yahoo.com

Abstrak

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilakukan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian (khususnya di Kabupaten Sidoarjo) melalui *Innovation Government* dan *Electronic Government*. BKD Sidoarjo meluncurkan aplikasi berbasis elektronik yang bernama SIPEKAT (Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat). Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 SIPEKAT dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang. Aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) yang memiliki tujuh indikator, antara lain: Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), *Human Resources* (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), *Human Resources* (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi layanan SIPEKAT sudah cukup direspon dengan baik oleh PNS Sidoarjo, infrastruktur yang memadai baik dari segi *Hardware* dan *Software* guna untuk mencapai tujuan dari layanan SIPEKAT ini. SDM yang ada tidak berdasarkan latar belakang pendidikan ahli teknologi informasi, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk berjalannya program layanan SIPEKAT. Selain itu sikap pengguna dari SKPD lain harus lebih meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan fasilitas pendukung program layanan berbasis *e-Government* ini.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, SIPEKAT

Abstrack

Public service is one of the government tasks that must be done. Regional Personnel Agency of Sidoarjo Regency that has duties and functions and authority in the field of personnel is required to be able to improve the quality of personnel administration service (especially in Sidoarjo District) through Innovation Government and Electronic Government. BKD Sidoarjo launched an electronic-based application called SIPEKAT (Advancement Management System). Based on the Decree of The Regent of Sidoarjo Number: 800/307 / 404.6.1 / 2015, SIPEKAT can cut the slot of personnel services and face-to-face process between the admin or staff in The Sub Division of Advancment and Retirement with interested parties to be reduced. The aspects of e-Government implementation to create better service according to Rianto and Lestari (2012:43) which has seven indicators, such as: Hardware, Software, Human Resources, Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementer's Attitude. This research uses

descriptive research method with qualitative approach. The techniques of data collection in this study is through interviews, observation and documentation. The focus that used in this research is using Hardware, Software, Human Resources, Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementer's Attitude. The techniques of analyzing data are collecting data, reducing data, presenting data, concluding or verifying data. The results showed that the implementation of SIPEKAT service is considered. To be good enough and being responded well by Civil Servant Sidoarjo, the infrastructure is fulfilled both in terms of Hardware and Software in order to achieve the purpose of this SIPEKAT service. The existing human resources are not based on the educational background of information technology experts, but they are not a barrier to the SIPEKAT service program. In other hand, the attitude of the users of other Regional Work Unit should increase knowledge and improve supporters's facilities of this e-Government service program.

Key words: Implementation, Public Service, SIPEKAT

PENDAHULUAN

Terdapat banyak tugas pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat banyak. Pelayanan publik diberikan oleh negara melalui organisasi atau perusahaan maupun instansi pemerintah demi menciptakan suatu tujuan serta dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik tentunya tidak terlepas dari peran Aparatur Negara sebagai penyelenggaranya. Peran Aparatur Negara merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Febriana (2014:1) Aparatur sebagai penyelenggara Negara dan Pemerintahan wajib bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai perilaku sikap yang taat, disiplin, bermoral dan bermental baik serta akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pemberi layanan publik yang baik.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian wilayah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian (khususnya di Kabupaten Sidoarjo) salah satunya yaitu pengusulan kenaikan pangkat ASN secara optimal dalam upaya mewujudkan SDM aparatur yang profesional.

Berdasarkan wawancara awal dengan Nur Indriani Apriliyanti, S. STP., selaku Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo dalam menangani pelayanan pengelolaan kenaikan pangkat ASN melalui sistem manual. Hal ini sebagaimana wawancara berikut: "Sebelumnya dalam proses pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam setahun diberikan pada 2 periode waktu yaitu 1 April dan 1 Oktober dengan jumlah kurang lebih 1000 orang setiap periodenya, dengan jumlah berkas yang harus dihimpun adalah 2000×13 (dokumen) $\times 3$ (rangkap) = 78.000 berkas. Hal tersebut juga menjadi masalah karena terbatasnya tempat penyimpanan arsip berkas akibat besarnya jumlah berkas yang harus disimpan setiap periode kenaikan pangkat" (wawancara dilakukan pada 31 Oktober 2017).

Menurut Ibu Sri Witarsih selaku Kepala BKD Sidoarjo dalam situs www.harianbhirawa.com yang dipublikasikan pada tanggal 4 Juni 2017 terdapat masalah yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo dalam menangani pelayanan kenaikan pangkat ASN melalui sistem manual jika dilihat dari segi keamanan yaitu pada saat proses pengajuan kenaikan pangkat apabila berkas yang dipersyaratkan terdapat kekurangan maka ASN harus bolak-balik hal tersebut dapat menghabiskan waktu di jalan (tidak efisien).

Banyaknya permasalahan yang ada menunjukkan bahwa belum optimalnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang disebabkan karena pelayanan yang masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas SDM aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program inovasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan. Di sisi lain tuntutan layanan inovasi tersebut datang dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari segi

Pemerintah Pusat hal ini merespon adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Menurut Wakil Bupati Sidoarjo dalam situs www.sidoarjokab.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2017 penerapan pelayanan berbasis *e-Government* di Sidoarjo merupakan salah satu wujud dari program *Smart City* yang diprioritaskan oleh Bupati Sidoarjo dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik berbasis *e-Government* serta dapat mendorong terciptanya *Good Governance* dalam Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh BKD Sidoarjo serta adanya tuntutan layanan dalam segi *Innovation Government* dan *Electronic Government* dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka BKD Sidoarjo meluncurkan aplikasi berbasis elektronik yang bernama SIPEKAT (Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat). SIPEKAT mulai diimplementasikan oleh BKD Sidoarjo pada bulan November 2015 untuk usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2016. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 dengan adanya sistem ini dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktek pungutan liar dan juga KKN. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih mudah dalam melakukan pengurusan kepegawaian.

SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan Pangkat. Melalui SIPEKAT ini terbangun sebuah mekanisme komunikasi kolaborasi, dan pertukaran informasi dalam proses Kenaikan Pangkat serta mempermudah dalam pengiriman berkas-berkas dengan cara *online*. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs www.sidoarjokab.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 18 April 2017 bahwa terbukti telah ada 703 PNS Pemkab Sidoarjo mengalami kenaikan pangkat dengan memanfaatkan aplikasi SIPEKAT. Seluruhnya telah mendapatkan SK kenaikan pangkat reguler periode April 2017.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya aplikasi SIPEKAT dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo, khususnya kemudahan dalam proses kenaikan pangkat. Serta sebagai aplikasi pelayanan publik berbasis *e-Government* yang baru dikembangkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi SIPEKAT dapat dijalankan sehingga perlu untuk melakukan penelitian yang lebih dalam melalui **“Implementasi Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo”**.

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi mengenai bagaimana implementasi layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori indikator aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43): *Hardware, Software, Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan menggunakan 3 cara menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:246) yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan Pangkat. Di mana *software* yang digunakan untuk aplikasi SIPEKAT yaitu *software* aplikasi berbasis *website*. Yang terlibat dalam pembuatan *software* aplikasi ini yaitu BKD Sidoarjo bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Valsix Kreasi Teknologi selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang *software* dan menyediakan solusi berbasis IT yang inovatif dan terintegrasi. Untuk *server* yang dimiliki BKD Sidoarjo telah didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar karena *server* ini memuat dua aplikasi yaitu aplikasi SIPEKAT dan aplikasi KGB (Kenaikan Gaji Berkala) yang sama-sama dioperasikan oleh Bidang Mutasi BKD Sidoarjo.

Melalui SIPEKAT ini terbangun sebuah mekanisme komunikasi kolaborasi, dan pertukaran informasi dalam proses Kenaikan Pangkat serta mempermudah dalam pengiriman berkas-berkas dengan cara *online*. Begitu juga ketika ada kekurangan persyaratan / berkas yang *upload*, admin BKD akan menginformasikannya lewat aplikasi ini, dan

admin OPD merespon melalui aplikasi tersebut. Sejauh ini tingkat efektifitas dan efisiensi program implementasi SIPEKAT telah terbukti dengan adanya 703 PNS Pemkab Sidoarjo yang mengalami kenaikan pangkat dengan memanfaatkan aplikasi SIPEKAT. Seluruhnya telah mendapatkan SK kenaikan pangkat reguler periode April 2017. SK kenaikan pangkat diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo pada kegiatan apel PNS di Alun-alun Sidoarjo hari Senin tanggal 17 April 2017. Dalam implementasi layanan *e-Government* ini agar mendapat hasil yang diharapkan sesuai dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 maka harus melihat aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43).

1. *Hardware*

Perangkat keras komputer (*hardware*) yang disediakan oleh BKD Sidoarjo dinilai cukup memadai dalam pengoprasian aplikasi SIPEKAT. Telah disediakan 5 unit komputer untuk Tim Pelaksana Program. Dinkominfo Sidoarjo mempunyai peran penting terhadap adanya aplikasi ini karena telah membantu Bidang Pengembangan selaku Tim *Monitoring* dalam menciptakan jaringan internet dan menyimpan fisik *server* aplikasi SIPEKAT.

2. *Software*

Software (perangkat lunak) yang digunakan untuk aplikasi SIPEKAT yaitu *software* aplikasi berbasis *website*. Yang terlibat dalam pembuatan *software* aplikasi ini yaitu BKD Sidoarjo bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Valsix Kreasi Teknologi. Untuk *server* yang dimiliki BKD Sidoarjo telah didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar. *Software* yang ada telah dijaga dengan aman untuk menghindari *hacker*. Tim teknis beserta tim *monitoring* mengontrol dan *backup* data yang ada secara berkala untuk menghindari *hacker*. Harapan yang diinginkan oleh pelaksana aplikasi SIPEKAT yaitu tidak ada pembajak yang dengan sengaja merusak aplikasi SIPEKAT. Adanya kendala lain yang ada yaitu gangguan koneksi internet yang terkadang bermasalah akibat terkena petir dan kendala pada saat proses *upload* berkas pada akhir *deadline* atau pada akhir batas pengusulan kenaikan pangkat terkadang sistem aplikasi bermasalah karena tidak sedikit yang mengakses aplikasinya. Faktor yang terpenting dalam mewujudkan implementasi layanan *E-Government* yaitu adanya sumber dana untuk *hardware* dan *software*. Sumber dana yang ada untuk menciptakan *hardware* dan *software* yaitu anggaran dari APBD sebesar Rp.

20.000.000,00 dengan induk Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Mengingat karena adanya peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah menyadari betul akan kualitas dan efektifitas manajemen kepegawaian di Sidoarjo.

3. *Human Resources* (SDM)

SDM yang ada untuk pelaksana aplikasi SIPEKAT masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam bidang teknologi informasi atau dalam artian yang bukan ahli di bidang IT. Akan tetapi, dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan khusus oleh Kepala BKD Sidoarjo mengenai perubahan proses layanan administrasi dengan menganut sistem *e-Government*, saat ini SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis *online* di BKD Sidoarjo. Hal ini tercermin dengan adanya penghargaan dari Menteri PAN-RB yaitu inovasi SIPEKAT masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2017.

4. Data dan Informasi

Adanya data dan informasi yang diberikan oleh BKD Sidoarjo dalam implementasi layanan SIPEKAT yaitu data internal yang dimiliki oleh Bidang Mutasi di BKD Sidoarjo yaitu adanya digitalisasi dokumen, dokumen yang dimaksud yaitu arsip-arsip kepegawaian bagi seluruh PNS Sidoarjo yang berupa *soft file*. Di sisi lain juga terdapat data dan informasi mengenai agenda yang akan datang yang dicantumkan dalam aplikasi SIPEKAT. Untuk kedepannya, Kepala Bidang Mutasi BKD Sidoarjo akan menambahkan *fitur* baru dalam aplikasi yaitu *fitur* yang dapat menyimpan dokumen persyaratan berkas usulan kenaikan pangkat demi memberikan kemudahan untuk PNS Sidoarjo yang akan mengusulkan kenaikan pangkat di periode selanjutnya. Adanya data dan informasi yang tersedia di *website* SIPEKAT serta informasi yang berasal dari pihak pengelolanya secara langsung sudah cukup memberikan informasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang juga ikut menentukan terwujudnya layanan SIPEKAT. Struktur Organisasi yang ada untuk melaksanakan program inovasi pelayanan SIPEKAT berasal dari Sub Bidang Kependidikan dan Pensiun di Bidang Mutasi dan ada sebagian dari Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN selaku Tim *Monitoring*. Dalam struktur organisasinya masih terdapat SDM yang tidak sesuai dengan latar pendidikan dalam bidang teknologi informasi. Namun, hal tersebut tidak lagi

menjadi halangan dalam berjalannya program layanan. Struktur organisasi yang dengan tepat dipilih langsung oleh Kepala BKD Sidoarjo serta yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus ini dinilai telah berkompeten dan mempunyai landasan yang cukup untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis *online* di BKD Sidoarjo, guna mewujudkan program *Smart City*.

6. Komunikasi

Proses komunikasi yang dilakukan oleh BKD Sidoarjo dengan SKPD lain salah satunya yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk membangun perspektif yang sama antara pihak BKD dan pihak SKPD lain sebagai pengguna aplikasi SIPEKAT. Sosialisasi yang dilakukan atau diadakan oleh Bidang Mutasi BKD Sidoarjo yaitu memberikan pelatihan khusus kepada SKPD lain, SKPD seluruh Kabupaten Sidoarjo dibekali ilmu dalam menggunakan aplikasi SIPEKAT. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi yang digunakan sudah cukup memadai dan komunikasi yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan setiap SKPD terkait dalam menanggapi pengaduan atau keluhan oleh SKPD lain kepada tim teknis di Bidang Mutasi BKD Sidoarjo. Bukan hanya itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dinilai cukup optimal dan berhasil karena dapat direspon SKPD lain dengan baik. Proses komunikasi yang lain yaitu melibatkan Bupati Sidoarjo dalam rangka penyerahan SK Kenaikan Pangkat yang dilakukan setiap periode kenaikan pangkat ASN di Sidoarjo.

7. Sikap Pelaksana

Yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian utama dalam mewujudkan implementasi layanan SIPEKAT dan untuk mewujudkan layanan administrasi kepegawaian yang lebih baik yaitu bagaimana sikap pelaksana implementasinya. BKD Sidoarjo terutama Bidang Mutasi telah mengimplementasikan program sistem layanan kenaikan pangkat secara optimal dan konsisten. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban, komitmen serta tanggung jawab BKD Sidoarjo atas memberikan layanan kepada seluruh PNS di Sidoarjo. Sikap pelaksana yang diberikan oleh Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun di Bidang Mutasi BKD Sidoarjo telah direspon baik oleh admin pengguna aplikasi SIPEKAT, karena tim pengelola aplikasi telah merespon dengan cepat dan tanggap adanya keluhan dari admin lain pengguna aplikasi. Sedikit respon negatif dari sikap pengguna di SKPD lain, yaitu dengan adanya layanan SIPEKAT terdapat kendala masih banyaknya SKPD yang belum memiliki mesin *scanner* untuk menjadikan berkas *hardcopy* ke

softcopy. Oleh karena itu, adanya SIPEKAT ini sedikit dinilai ribet oleh pelaksana dari SKPD lain. Namun selebihnya sikap pelaksana atau implementasinya dinilai sudah cukup optimal dan profesional.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini terkait dengan Implementasi Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Sistem layanan administrasi kepegawaian berbasis *Electronic Government* untuk mewujudkan program Sidoarjo *Smart City*. Aplikasi berbasis *website* ini juga telah mendapat dukungan penuh oleh Bupati Sidoarjo. Aplikasi SIPEKAT mulai diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo pada November 2016 yang bertujuan sebagai layanan pengusulan kenaikan pangkat ASN di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan sistem *paperless*, cukup melakukan *upload* berkas secara *online* melalui aplikasi SIPEKAT. Dengan sistem ini dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka. Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Sidoarjo dapat lebih mudah dalam melakukan pengurusan kepegawaian. Dalam implementasi layanan *e-Government* ini agar mendapat hasil yang diharapkan sesuai dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 maka harus melihat aspek-aspek dalam implementasi *e-Government* untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43).

Indikator pertama dan kedua yaitu Perangkat keras komputer (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang disediakan oleh BKD Sidoarjo dinilai cukup memadai dalam pengoprasian aplikasi SIPEKAT. *Software* digunakan untuk aplikasi SIPEKAT yaitu *software* aplikasi berbasis *website*. Yang terlibat dalam pembuatan *software* aplikasi ini yaitu BKD Sidoarjo bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Valsix Kreasi Teknologi. Untuk *server* yang dimiliki BKD Sidoarjo telah didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar. *Software* yang ada telah dijaga dengan aman untuk menghindari *hacker*. Adanya kendala lain yang ada yaitu gangguan koneksi internet yang terkadang bermasalah akibat terkena petir. Faktor yang terpenting dalam mewujudkan implementasi layanan *E-Government* yaitu adanya sumber dana untuk *hardware* dan *software* yaitu anggaran dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00.

Indikator ketiga yaitu SDM yang ada untuk pelaksana aplikasi SIPEKAT masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Akan tetapi, dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan khusus oleh Kepala BKD Sidoarjo saat ini SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis *online* di BKD Sidoarjo.

Indikator keempat adanya data dan informasi yang diberikan oleh BKD Sidoarjo dalam implementasi layanan SIPEKAT yaitu data internal yang dimiliki oleh Bidang Mutasi di BKD Sidoarjo yaitu adanya digitalisasi dokumen, dokumen yang dimaksud yaitu arsip-arsip kepegawaian bagi seluruh PNS Sidoarjo yang berupa *soft file*. Di sisi lain juga terdapat data dan informasi mengenai agenda yang akan datang yang dicantumkan dalam aplikasi SIPEKAT. Adanya data dan informasi yang tersedia di *website* SIPEKAT serta informasi yang berasal dari pihak pengelolanya secara langsung sudah cukup memberikan informasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

Indikator kelima yang juga ikut menentukan terwujudnya layanan SIPEKAT adalah struktur organisasinya. Struktur organisasi yang dengan tepat dipilih langsung oleh Kepala BKD Sidoarjo serta yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan khusus ini dinilai telah berkompeten dan mempunyai landasan yang cukup untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis *online* di BKD Sidoarjo, guna mewujudkan program *Smart City*.

Indikator keenam yaitu komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh BKD Sidoarjo dengan SKPD yaitu sosialisasi yang bertujuan untuk membangun perspektif yang sama antara pihak BKD dan pihak SKPD lain sebagai pengguna aplikasi SIPEKAT. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dinilai cukup optimal dan berhasil karena dapat direspon SKPD lain dengan baik. Proses komunikasi yang lain yaitu melibatkan Bupati Sidoarjo dalam rangka penyerahan SK Kenaikan Pangkat yang dilakukan setiap periode kenaikan pangkat ASN di Sidoarjo.

Indikator terakhir yaitu bagaimana sikap pelaksana implementornya. BKD Sidoarjo terutama Bidang Mutasi telah mengimplementasikan program sistem layanan kenaikan pangkat secara optimal dan konsisten. Karena, hal tersebut merupakan kewajiban, komitmen serta tanggung jawab BKD Sidoarjo atas memberikan layanan kepada seluruh PNS di Sidoarjo. Sikap pelaksana yang Bidang Mutasi BKD Sidoarjo telah direspon baik oleh admin pengguna aplikasi SIPEKAT, karena tim pengelola

aplikasi telah merespon dengan cepat dan tanggap adanya keluhan dari admin lain pengguna aplikasi. Sedikit respon negatif dari sikap pengguna di SKPD lain, yaitu dengan adanya layanan SIPEKAT terdapat kendala masih banyaknya SKPD yang belum memiliki mesin *scanner* untuk menjadikan berkas *hardcopy* ke *softcopy*. Oleh karena itu, adanya SIPEKAT ini sedikit dinilai ribet oleh pelaksana dari SKPD lain. Namun selebihnya sikap pelaksana atau implementornya dinilai sudah cukup optimal dan professional.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa,
- b. Eva Hany Fanida, S.AP, M.AP., selaku dosen pembimbing,
- c. Fitritun Niswah, S.AP, M.AP., Galih Wahyu Pradana, S.AP, M.Si. selaku dosen penguji,
- d. M. farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti,
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara moral maupun materil kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Badu dkk. *Modul Mata Kuliah. 2013. Elektronik Government (E-Gov)*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Ainur, Ahmad dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI hal 134*. Jakarta: Rineka Apta.
- Indonesia, LANRI. 2004. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Edisi Kedua. Jakarta: LAN
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: ANDI
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi e-Government*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Indriyani, Evi dan Humdiana. 2006. *Sistem Informasi Manajemen: Obsesi Mengoptimalkan Informasi dalam Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnama, Nursya'bani. 2006. *Manajemen Kualitas Perspektif Global*. Yogyakarta: Ekonisia
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual , Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: PMN.
- Salusu, Jonathan. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit Cetakan Ke-enam*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, Drs. dan Ana Retnoningsih Dra. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama. Semarang: Widya Karya.
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London: Aslib, the association for information management and information management international. Diakses 10 Oktober 2017
- Febriana, Deri. 2014. *Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Diakses 5 November 2017
- Ha, Huong. 2013. *E-Government in Singapore: Critical Success Factors. E-Government Success around the World: Cases, Empirical Studies, and Practical Recommendations Page 22*. Diakses 19 Oktober 2017
- Hermana, B dan Silfianti, W. 2011. *Evaluating E-Government Implementation By Local Government: Digital Divide In Internet Based Public Services In Indonesia*. *International Journal of Business and Social Science*. Diakses 2 Oktober 2017
- Safitri, Nurul Wahida. 2016. *Penerapan E-Government di Pusat Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang*. Diakses 10 Oktober 2017
- Ardiansyah, Dimas. 2016. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Untuk Mewujudkan E-Government Di Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo*
- Pura, Lantri Vidya. 2017. *Implementasi Layanan E-Wadul Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Stategi Nasional Pengembangan E-Government. 2003. Jakarta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2004. Jakarta
- Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 800/307/404.6.1/2015 tentang Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2015. Sidoarjo
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2014. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2009. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Inovasi "SIPeKat" Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2017 www.sidoarjokab.go.id Diakses 20 September 2017
- 703 PNS Pemkab Sidoarjo Naik Pangkat: "Sipekat" digunakan untuk Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat www.sidoarjokab.go.id Diakses 20 September 2017